



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BANDA ACEH

2016 



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BANDA ACEH

2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KOTA BANDA ACEH 2016

Katalog BPS : 4102002.1171

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman : vi + 27 halaman

Naskah : Seksi Statistik Sosial

Gambar Kulit : Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh : BPS Kota Banda Aceh

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://www.bandaacehkota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Masalah pembangunan manusia merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya melaksanakan survei-survei untuk menghasilkan berbagai indikator ekonomi dan sosial, dimana salah satunya digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia. Sejak tahun 2014 terdapat penyempurnaan metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan metode baru.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kemajuan di masa yang akan datang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna data.

Banda Aceh, 3 Juli 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Banda Aceh

Ir. Hamdani, M.S.M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	3
1.3. Ruang Lingkup	4
1.3.1. Lingkup Materi	4
1.3.2. Lingkup Wilayah	4
1.4. Istilah-Istilah yang Digunakan (Terminologi)	4
BAB II DATA DAN METODOLOGI	7
2.1. Basis Data Pembangunan Manusia	7
2.1.1. Sumber Data	7
2.1.2. Data Indeks Pembangunan Manusia	8
2.2. Pendekatan IPM Sebagai Penunjang Pembangunan Manusia	9
2.2.1. Pendekatan Pemanfaatan IPM dalam Pembangunan Manusia	9
2.2.2. Perubahan Metodologi IPM	13
2.2.3. Konsep Penghitungan IPM	15
2.2.4. Penghitungan IPM	19
2.2.5. Kategori Peringkat Pembangunan Manusia	20
BAB III GAMBARAN IPM DI KOTA BANDA ACEH	21
3.1. Situasi Indikator Utama IPM Kota Banda Aceh	22
3.1.1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)	22
3.1.2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	26
3.1.3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	29
3.1.4. Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	32
3.2. IPM Kota Banda Aceh	35
Lampiran	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator Komponen IPM	20
------------	---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Pencapaian Aktual Angka Harapan Hidup Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional, 2015–2016	22
Grafik 3.2.	AHH Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016	23
Grafik 3.3.	AHH Kota Banda Aceh dan Seluruh Provinsi di Indonesia, 2016	25
Grafik 3.4.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional, 2016	26
Grafik 3.5.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016	27
Grafik 3.6.	HLS Kota Banda Aceh dan Seluruh Provinsi di Indonesia, 2016	28
Grafik 3.7.	Pencapaian Aktual Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional, 2016	29
Grafik 3.8.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016	30
Grafik 3.9.	RLS Kota Banda Aceh dan Seluruh Provinsi di Indonesia, 2016	31
Grafik 3.10.	Pencapaian Aktual Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional (000 Rp per Orang per Tahun), 2016	32
Grafik 3.11.	Pencapaian Aktual Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh (000 Rp per Orang per Tahun), 2016	33
Grafik 3.12.	Pencapaian Aktual Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kota Banda Aceh dan Seluruh Provinsi di Indonesia (000 Rp per Orang per Tahun), 2016	34
Grafik 3.13.	IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh, 2016	36
Grafik 3.14.	IPM Kota Banda Aceh dan Seluruh Provinsi di Indonesia, 2016	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh	8
Gambar 2.2.	Model Penggunaan Alat Penghubung Input dan Output	9
Gambar 2.3.	Pendekatan dari "Atas ke Bawah" (<i>Top Down Approach</i>)	10
Gambar 2.4.	Pendekatan dari "Bawah ke Atas" (<i>Bottom Up Approach</i>)	11
Gambar 2.5.	Pendekatan Kombinasi <i>Top Down</i> dan <i>Bottom Up</i> (<i>Hybrid Approach</i>)	12
Gambar 2.6.	Perubahan Metodologi IPM	13
Gambar 2.7.	Perbandingan IPM Metode Lama dan Metode Baru	15

<http://www.bandaacehkota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan pembangunan manusia yang sesungguhnya adalah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Hal ini berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahapan pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan tujuan jangka panjang dari suatu masyarakat, dan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya dan tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, namun seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi.

Paradigma pembangunan manusia mengandung 4 (empat) komponen utama:

- a. *Produktivitas*. Manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya dan berpartisipasi penuh dalam mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.

- b. *Pemerataan*. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan, sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapat keuntungan dari peluang yang sama.
- c. *Keberlanjutan*. Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya harus dapat diperbaharui.
- d. *Pemberdayaan*. Semua orang diharapkan berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dalam proses aktifitasnya.

Penyertaan konsep pembangunan manusia dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, akan tetapi mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencegah perusakan lingkungan. Namun, perbedaannya adalah dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut diatas diletakkan dalam kerangka untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Agar konsep pembangunan manusia dapat diterjemahkan ke dalam perumusan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. *Human Development Report* (HDR) global telah mengembangkan dan menyempurnakan pengukuran statistik dari pembangunan manusia yaitu berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun komponen-komponen dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi : lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan/tingkat pendidikan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Untuk memperoleh gambaran tentang pembangunan manusia di Kota Banda Aceh, maka disusunlah publikasi “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh Tahun 2016”, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai

masuk dalam penentuan kebijakan pembangunan di Kota Banda Aceh.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penulisan ini adalah menyajikan data dan informasi tentang kondisi penduduk dan permasalahannya, sebagai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Kota Banda Aceh, termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Teridentifikasinya kondisi beberapa variabel sektoral dalam pembangunan manusia, meliputi sektor-sektor: kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kota Banda Aceh.
- b. Memberikan gambaran permasalahan yang ada di bidang pembangunan manusia di Kota Banda Aceh.
- c. Diperolehnya gambaran tentang perkembangan ukuran pembangunan manusia (IPM) dan indikator-indikator sosial lainnya di Kota Banda Aceh.
- d. Terumuskannya implikasi masalah dan kebijakan untuk menangani berbagai masalah yang merupakan bagian dari perencanaan dan penanganan pembangunan manusia.

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1. Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penulisan ini meliputi :

- Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran besaran IPM yang meliputi: lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup (*decent living*).
- Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor kunci yang terkait dengan IPM, meliputi indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
- Pengukuran besaran angka IPM Kota Banda Aceh.
- Rumusan kebijakan dalam rangka pembangunan manusia berdasarkan besaran angka IPM yang diperoleh di Kota Banda Aceh.

1.3.2. Lingkup Wilayah

Lokasi penelitian mencakup wilayah di Kota Banda Aceh.

1.4. Istilah-istilah yang Digunakan (Terminologi)

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang disusun dari tiga indikator: lama hidup, pendidikan dan standar hidup.
- Indeks Harapan Hidup adalah salah satu dari komponen IPM. Nilai ini berkisar antara 0 – 100.
- Indeks Pendidikan, indeks ini didasarkan pada kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

- Angka Harapan Hidup (e_0) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada pola mortalitas menurut umur.
- Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
- Angka Partisipasi Sekolah adalah proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, dan 16-18) yang masih duduk di bangku sekolah).
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS), menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan.
- Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah tepat waktu.
- Partisipasi Angkatan Kerja, menggambarkan persentase penduduk yang membutuhkan pekerjaan (aktif secara ekonomis) atau memberi gambaran seberapa besar keterlibatan penduduk dalam ekonomi produktif.

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka di kalangan angkatan kerja.
- Setengah Menganggur, menggambarkan tidak bekerja penuh yang dapat dilihat dari jam kerja, produktivitas dan pendapatan.
- Kontribusi Sektor Perekonomian dalam Penyerapan Tenaga Kerja adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui andil setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja.
- Persentase Penolong Persalinan adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi.
- Rata-rata Lama Sakit adalah indikator yang menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang diderita penduduk. Indikator ini juga menggambarkan besarnya kerugian materiil yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita. Semakin besar nilai indikator ini, semakin besar kerugian yang dialami.
- Angka Sakit adalah indikator yang memberi gambaran prevalensi kesakitan (keluhan kesehatan) oleh masyarakat dan juga digunakan untuk melihat tingkat kesehatan penduduk suatu daerah.

BAB II

DATA DAN METODOLOGI

Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses pengambilan keputusan, dimana kualitas keputusan sangat tergantung pada informasi yang mendasarinya. Oleh karena itu, perencana pembangunan harus memberikan perhatian yang memadai terhadap masalah pengumpulan dan penyajian informasi untuk keperluan perencanaan. Walaupun demikian perlu diingat bahwa pengumpulan dan pengolahan data bukan merupakan tujuan akhir melainkan semata-mata sebagai sarana untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik.

2.1. Basis Data Pembangunan Manusia

2.1.1. Sumber Data

Perencanaan pembangunan manusia perlu menyadari bahwa yang berguna bagi perencanaan dan pembuatan kebijakan hanyalah data atau informasi yang memberikan gambaran keadaan sebenarnya (*represent reality*). Oleh karena itu, perlu dipahami secara memadai jenis pengumpulan data serta kualitas data yang dikumpulkan. Perencana pembangunan manusia juga harus dapat memanfaatkan secara optimal data yang relevan baik yang dikumpulkan melalui sensus dan survei maupun yang diperoleh dari instansi-instansi terkait terutama yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilitas, perumahan dan sanitasi, dan pengeluaran rumah tangga.

Informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan manusia dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Perencana harus menyadari bahwa kedua jenis informasi tersebut saling melengkapi atau menunjang sehingga keduanya diperlukan untuk analisis, monitoring dan

evaluasi yang lebih baik.

2.1.2. Data Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Sehingga untuk penyusunan IPM diperlukan data derajat kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat (Gambar 2.1).

Gambar 2.1.
Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh



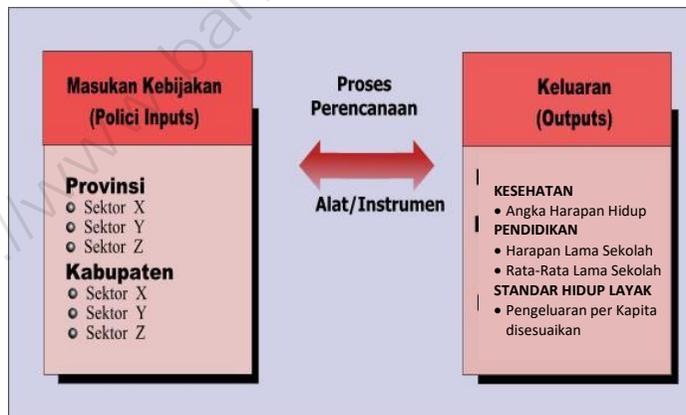
Dalam penyusunan publikasi “Indeks Pembangunan Manusia di Kota Banda Aceh Tahun 2016” digunakan tiga jenis data yang diperoleh dari kegiatan Susenas yang dilakukan setiap tahun oleh BPS. Survei tersebut merupakan kegiatan pengumpulan data yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi yang cukup kompleks. Susenas mengumpulkan berbagai informasi seperti kependudukan, kesehatan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, dan perumahan serta lingkungan.

2.2. Pendekatan IPM Sebagai Penunjang Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). UNDP sejak tahun 1990 menggunakan IPM untuk mengukur laporan tahunan perkembangan pembangunan manusia.

2.2.1. Pendekatan Pemanfaatan IPM dalam Pembangunan Manusia

Gambar 2.2.
Model Penggunaan Alat Penghubung Input dan Output



Model sebagaimana pada Gambar 2.2. menggambarkan mekanisme hubungan antara input-proses-output (IPO). Dalam hal ini, kebijakan daerah berupa penetapan komposisi alokasi anggaran daerah per sektor/program dalam RAPBD. Sedangkan output dalam model ini

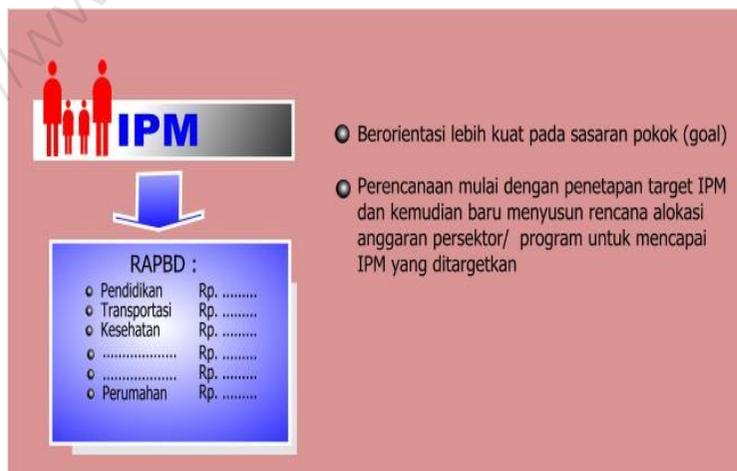
diwujudkan dalam tiga parameter IPM. Dalam model ini, IPM sebagai indeks komposit, bukanlah berperan sebagai alat perencanaan (*planning tools*) tetapi merupakan “*outcome*” atau hasil dari suatu proses perencanaan. Sekalipun IPM bukanlah sebagai alat perencanaan, namun dapat dimanfaatkan untuk menjadi arahan bagaimana anggaran pembangunan daerah semestinya dialokasikan agar mampu meningkatkan hasil pembangunan manusia yang tercermin dengan semakin tingginya IPM.

Untuk menghubungkan antara faktor input (RAPBD) di satu sisi dan faktor output (tiga parameter IPM), dalam proses perencanaannya untuk model ini diperlukan sebuah alat dalam bentuk lembar kerja (*worksheet*) yang dengan mudah digunakan melalui pemanfaatan komputer dan perangkat lunaknya dalam bentuk program aplikasi.

Implementasi model diatas dalam perencanaan pembangunan manusia, dapat diaplikasikan melalui tiga alternatif metode, yaitu :

1. *Top down approach*

Gambar 2.3.
Pendekatan dari “Atas ke Bawah”
(*Top down approach*)



Pendekatan ini (lihat Gambar 2.3.), bertitik tolak dari target peningkatan IPM yang ditetapkan masing-masing daerah. Berangkat dari target tersebut kemudian disusunlah rancangan alokasi sektor-sektor APBD dengan menggunakan alat/instrumen perencanaan dalam bentuk lembar kerja (*worksheet*) yang mudah digunakan dengan bantuan komputer. Dengan menggunakan lembar kerja (*worksheet*) ini rencana komposisi alokasi setiap sektor pembangunan dalam proses penyusunannya dapat diubah-ubah hingga angka IPM yang ditargetkan secara perhitungan dapat dicapai.

2. *Bottom up approach*

Gambar 2.4.
Pendekatan dari “Bawah ke Atas”
(*Bottom up approach*)



Pendekatan ini (Gambar 2.4.) berbanding terbalik dengan pendekatan yang pertama. Pemanfaatan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan dari bawah (*bottom up*), berangkat dari target IPM yang ingin dicapai, tetapi dimulai dengan menetapkan komposisi rencana anggaran per sektor/program

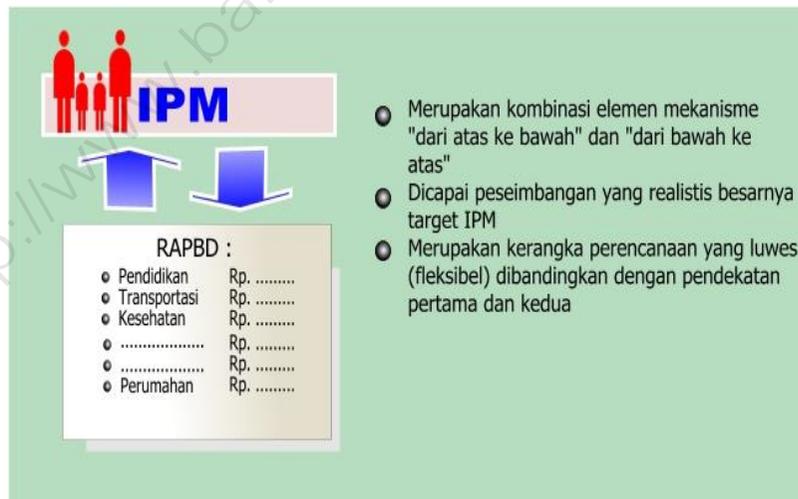
sebagaimana yang selama ini dilakukan, kemudian baru dihitung berapa pengaruhnya terhadap kenaikan IPM.

3. *Hybrid approach*

Pendekatan ini (Gambar 2.5) merupakan kombinasi dari pendekatan pertama dan kedua, dimana dalam aplikasinya dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi IPM yang ditargetkan dan sisi komposisi anggaran per sektor daerah yang dialokasikan. Keseimbangan antara dua sisi tersebut merupakan perencanaan yang realistis.

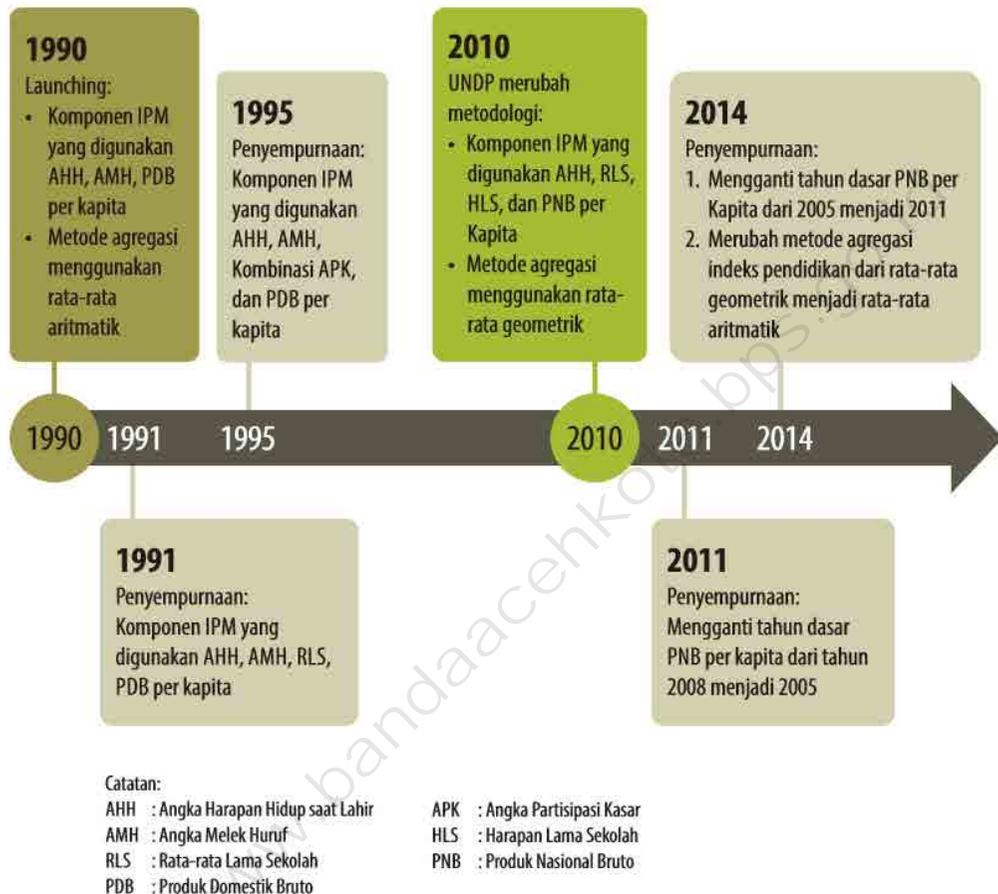
Dalam proses pengembangan IPM dalam perencanaan pembangunan daerah, masih terbuka adanya berbagai masukan penyempurnaan. Upaya pemantapan model ini akan diteruskan melalui tahapan-tahapan rencana pengembangan, yang di pusat dilaksanakan oleh Ditjen Bangda bekerjasama dengan BPS dan UNDP, sedangkan di daerah dikoordinasikan oleh Bappeda.

Gambar 2.5.
Pendekatan Kombinasi *Top Down* dan *Bottom Up*
(*Hybrid approach*)



2.2.2. Perubahan Metodologi IPM

Gambar 2.6.
Perubahan Metodologi IPM



Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM antara lain:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
2. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat

pada suatu wilayah.

3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Dengan demikian, terdapat indikator dan metode penghitungan yang mengalami perubahan, antara lain:

1. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
3. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Keunggulan IPM dengan metode baru antara lain:

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
2. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
3. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
4. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Perbandingan IPM dengan metode lama dan metode baru adalah sebagai berikut:

Gambar 2.7.
Perbandingan IPM Metode Lama dan Metode Baru

Dimensi	Metode Lama		Metode Baru	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (Rp)
Agregasi	Rata-rata Aritmatik		Rata-rata Geometrik	
	$IPM = \frac{1}{3} (I_{\text{kesehatan}} + I_{\text{pendidikan}} + I_{\text{pengeluaran}}) \times 100$		$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	

2.2.3. Konsep Penghitungan IPM

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*).

1. Usia Hidup

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” yang panjang dan sehat. Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan e_0 . Angka kematian bayi (IMR) tidak digunakan untuk keperluan itu karena indikator itu dinilai tidak memberikan dampak yang berarti bagi negara-negara industri yang telah maju.

Seperti halnya IMR, e_0 sebenarnya merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Di Indonesia e_0 dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Prosedur penghitungan e_0 yang diperoleh dengan metode tidak langsung merujuk pada keadaan 3-4 tahun dari tahun survei.

2. Pengetahuan

Selain usia hidup, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan dua indikator yaitu rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Sebagai catatan UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak tahun 1995 mengganti rata-rata lama sekolah dengan partisipasi sekolah dasar, menengah dan tinggi sekalipun diakui bahwa indikator yang kedua kurang sesuai sebagai indikator dampak. Penggantian dilakukan semata-mata karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah

secara global.

Seperti halnya angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dihitung dengan pengolahan tabulasi data. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan dua variabel secara simultan, yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dari penghitungan dengan menggunakan pola hubungan antar variabel-variabel tersebut akan diperoleh data lama sekolah masing-masing individu yang kemudian digunakan sub program MEANS dalam paket SPSS untuk menghitung rata-rata lama sekolah agregat.

3. Standar Hidup Layak

Selain usia hidup dan pengetahuan, unsur dasar pembangunan manusia yang diakui secara luas adalah standar hidup layak. Banyak indikator alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur unsur ini. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional UNDP, memilih GDP per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai indikator hidup layak.

Berbeda dengan indikator untuk kedua unsur IPM lainnya, indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Walaupun demikian UNDP tetap mempertahankannya karena indikator lain yang sesuai tidak tersedia secara global. Selain itu, dipertahankannya indikator input juga merupakan argumen bahwa selain usia hidup dan pengetahuan masih banyak variabel input yang pantas diperhitungkan dalam perhitungan IPM. Dilemanya, memasukkan banyak variabel atau indikator akan menyebabkan indikator komposit menjadi tidak sederhana. Dengan alasan itu maka

GDP riil perkapita yang telah disesuaikan dianggap mewakili indikator input IPM lainnya.

Untuk keperluan perhitungan IPM data dasar PDRB perkapita tidak dapat digunakan untuk mengukur standar hidup layak karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur daya beli penduduk (yang merupakan fokus IPM). Sebagai penggantinya digunakan konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan untuk keperluan yang sama.

Untuk menghitung konsumsi perkapita riil yang disesuaikan pertama dihitung terlebih dahulu daya beli untuk tiap unit barang atau *Purchasing Power Parity* (PPP/unit).

Perhitungan PPP/unit dilakukan sesuai rumus:

Penghitungan Paritas Daya Beli

Dihitung dari bundel komoditas makanan dan nonmakanan.



Rumus Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP)

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

- p_{ij} : harga komoditas i di kab/kota j
- p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan
- m : jumlah komoditas

2.2.4. Penghitungan IPM

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{Dimensi Kesehatan : } I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\min}}$$

$$\text{Dimensi Pendidikan : } I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

$$\text{Dimensi Pengeluaran : } I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometric dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Tabel 2.1.
Nilai Maksimum dan Nilai Minimum
Indikator Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 ** (Rp)

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

2.2.5. Kategori Peringkat Pembangunan Manusia

Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0.0 – 100.0 dengan kategori sebagai berikut :

- Tinggi : IPM lebih dari 80.0
- Menengah Atas : IPM antara 66.0 – 79.9
- Menengah Bawah : IPM antara 50.0 – 65.9
- Rendah : IPM kurang dari 50.0

BAB III

GAMBARAN IPM DI KOTA BANDA ACEH

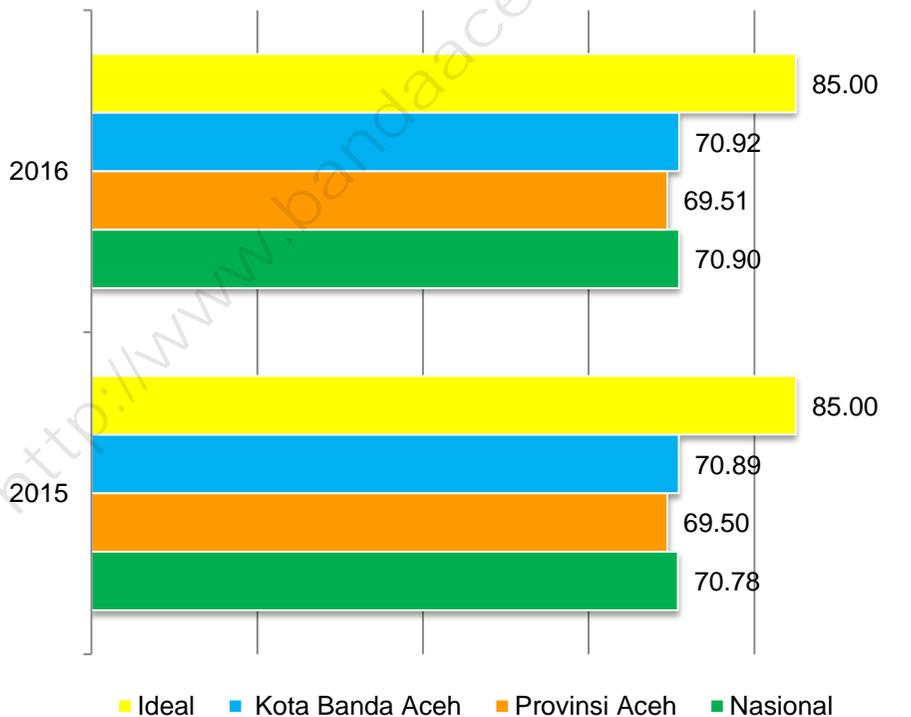


3.1. Situasi Indikator Utama IPM Kota Banda Aceh

3.1.1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)

Salah satu komponen dalam penyusunan angka IPM adalah Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH). Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikasi ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Semakin tinggi angka harapan hidup, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.

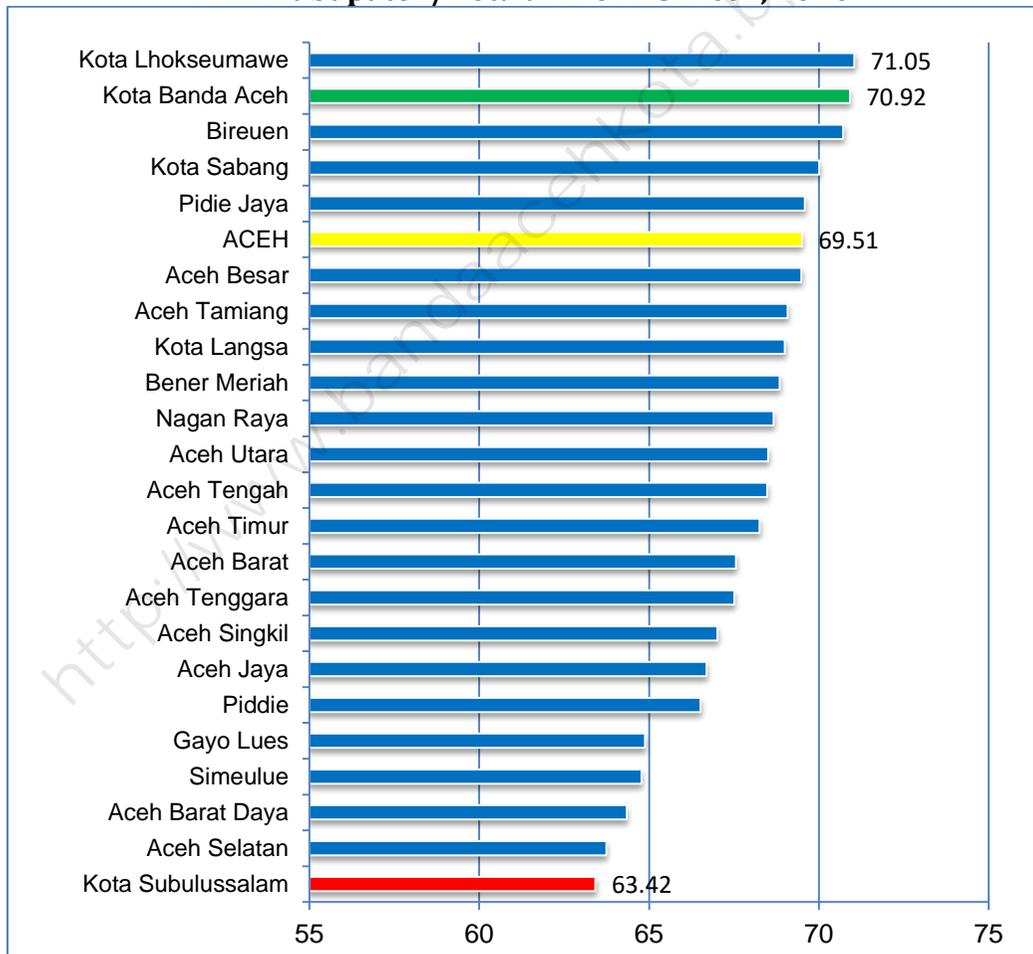
Grafik 3.1.
Pencapaian Aktual Angka Harapan Hidup
Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh, 2015 - 2016



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016)

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, angka harapan hidup Kota Banda Aceh terus meningkat. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2016, angka harapan hidup saat lahir di Kota Banda Aceh telah mencapai 70,92 tahun. Artinya, rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh penduduk Kota Banda Aceh dari lahir sampai meninggal dunia adalah 70 tahun. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kemampuan penduduk Kota Banda Aceh untuk hidup lebih lama dan hidup sehat termasuk kategori sedang, dimana standar harapan hidup paling tinggi adalah 85 tahun.

Grafik 3.2.
AHH Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016

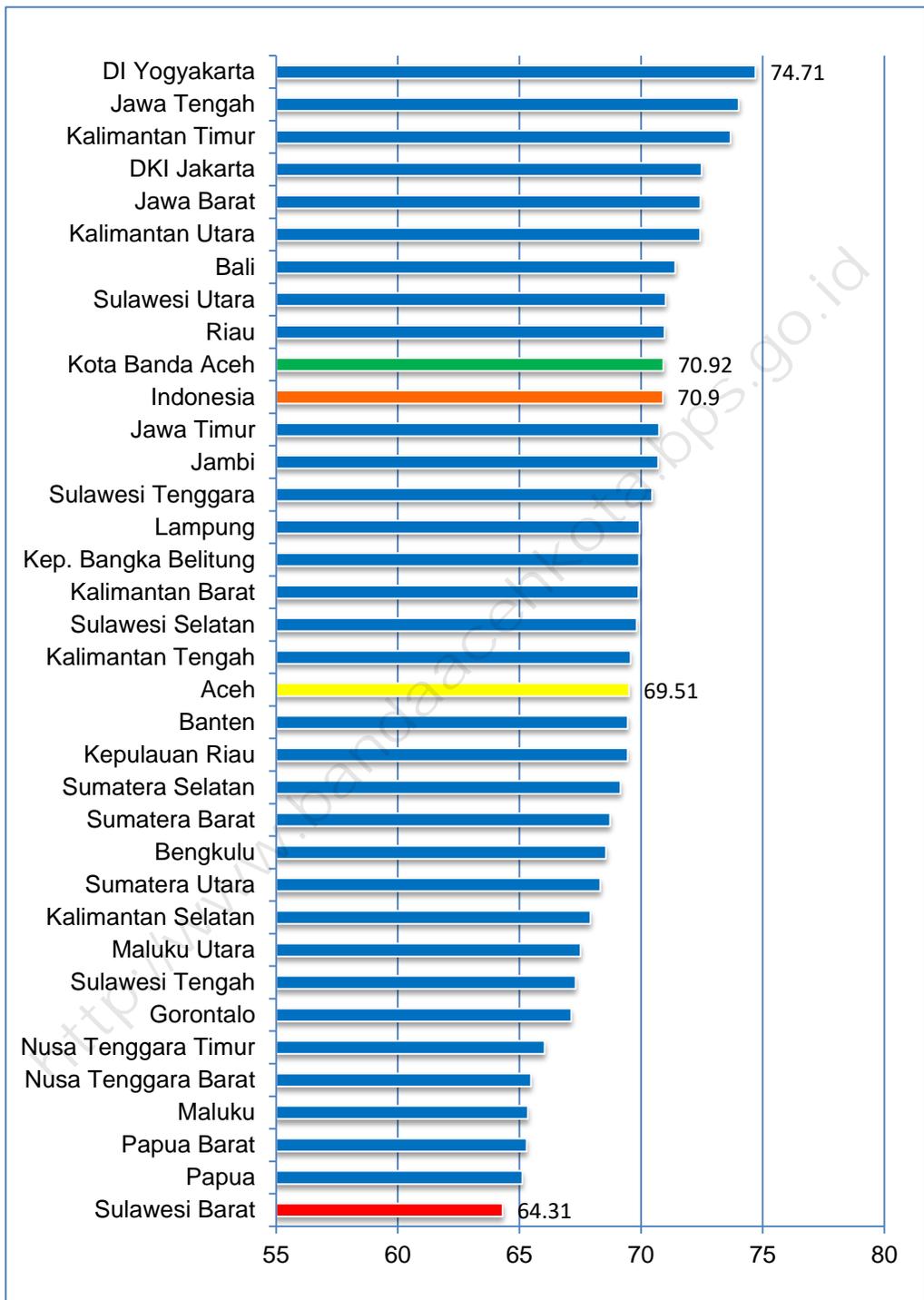


Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016)

Di tingkat kabupaten/kota, angka harapan hidup saat lahir pada tahun 2016 berkisar antara 63,42 tahun hingga 71,05 tahun. Angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Lhokseumawe sedangkan angka harapan hidup terendah berada di Kota Subulussalam. Angka harapan hidup Kota Banda Aceh berada di urutan kedua setelah Kota Lhokseumawe, kemudian diikuti oleh Kabupaten Bireuen (70,72 tahun) dan Kota Sabang (70,01 tahun). Secara umum, angka harapan hidup semua kabupaten mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Aceh meningkat (Lampiran 1).

Angka harapan hidup Kota Banda Aceh sebesar 70 tahun, sedikit lebih tinggi dibanding Angka harapan hidup Provinsi Aceh yang mencapai 69 tahun (Grafik 3.1.). Jika dibandingkan secara nasional dengan semua provinsi di Indonesia maka AHH Kota Banda Aceh menempati urutan ke sepuluh setelah Provinsi Riau dan berada sedikit di atas AHH Indonesia. Sementara itu, AHH tertinggi diraih oleh Provinsi DIY dan AHH terendah diduduki oleh Provinsi Papua dengan AHH masing-masing sebesar 74,71 tahun dan 64,31 tahun. Meskipun AHH Kota Banda Aceh sudah cukup tinggi, program pembangunan bidang kesehatan di Kota Banda Aceh masih perlu ditingkatkan kembali antara lain dengan meningkatkan penyediaan tenaga dan fasilitas kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, memperkecil angka kematian ibu dan anak, melaksanakan imunisasi, melakukan pemberantasan penyakit menular, menyediakan air bersih, memperbaiki sanitasi, serta meningkatkan pelayanan kesehatan.

Grafik 3.3.
AHH Kota Banda Aceh dan Seluruh Provinsi di Indonesia, 2016



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016)

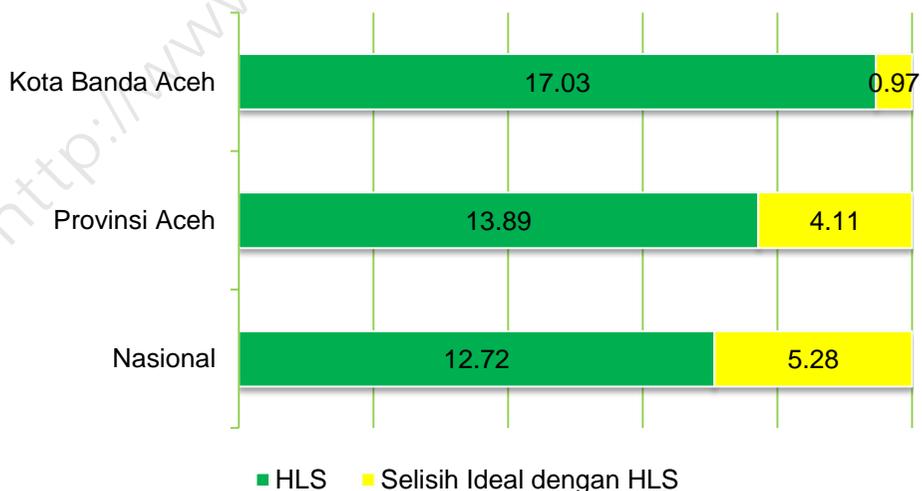
3.1.2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2016, angka harapan lama sekolah di Kota Banda Aceh mencapai 17,03 tahun atau 17 tahun, artinya selama 17 tahun diharapkan penduduk usia 7 tahun ke atas dapat merasakan pendidikan hingga tingkat sarjana.

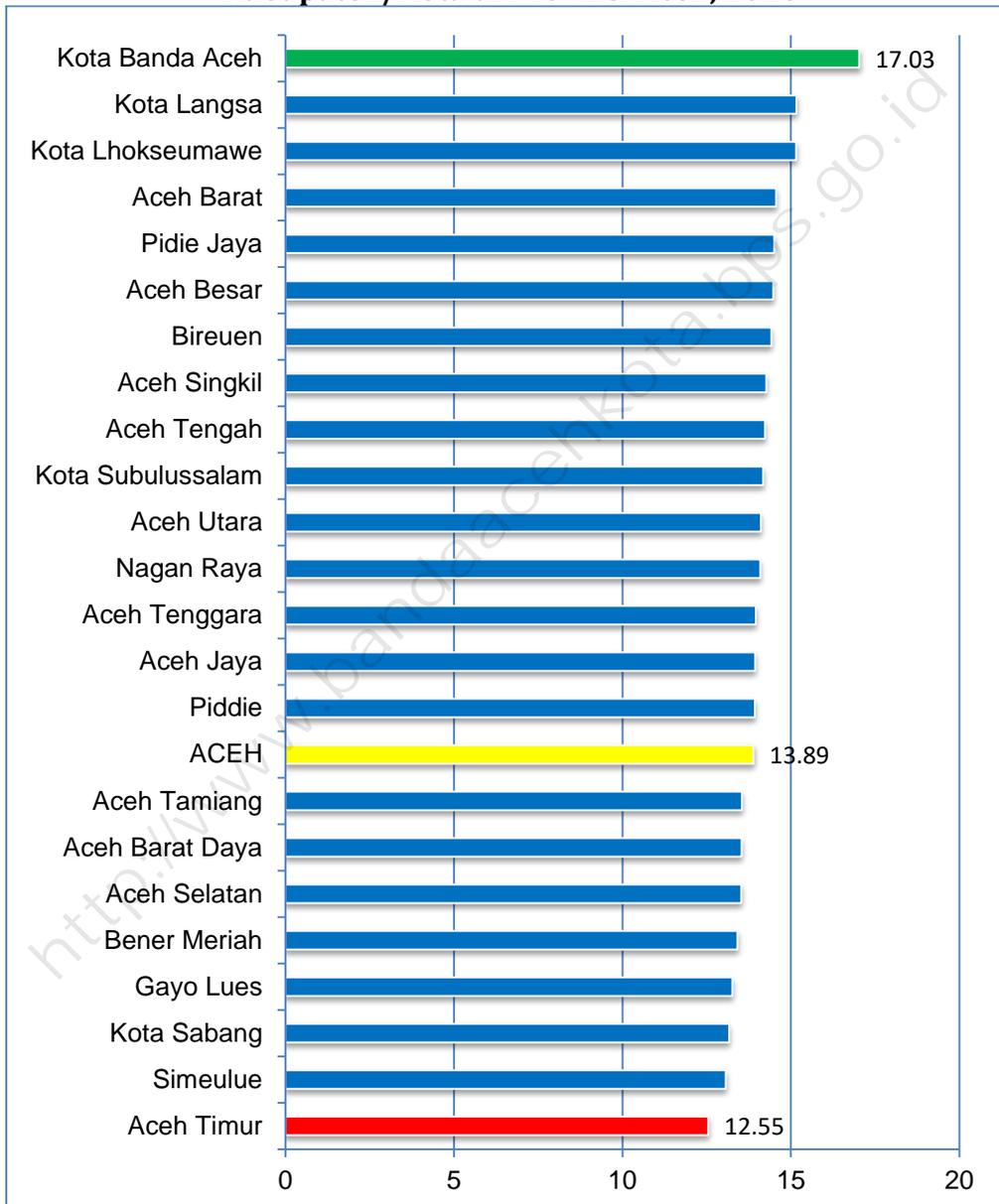
Grafik 3.4.
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional, 2016



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016)

Standar angka harapan lama sekolah berdasarkan UNDP dan BPS adalah 18 tahun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa angka harapan lama sekolah di Kota Banda Aceh hampir mencapai target.

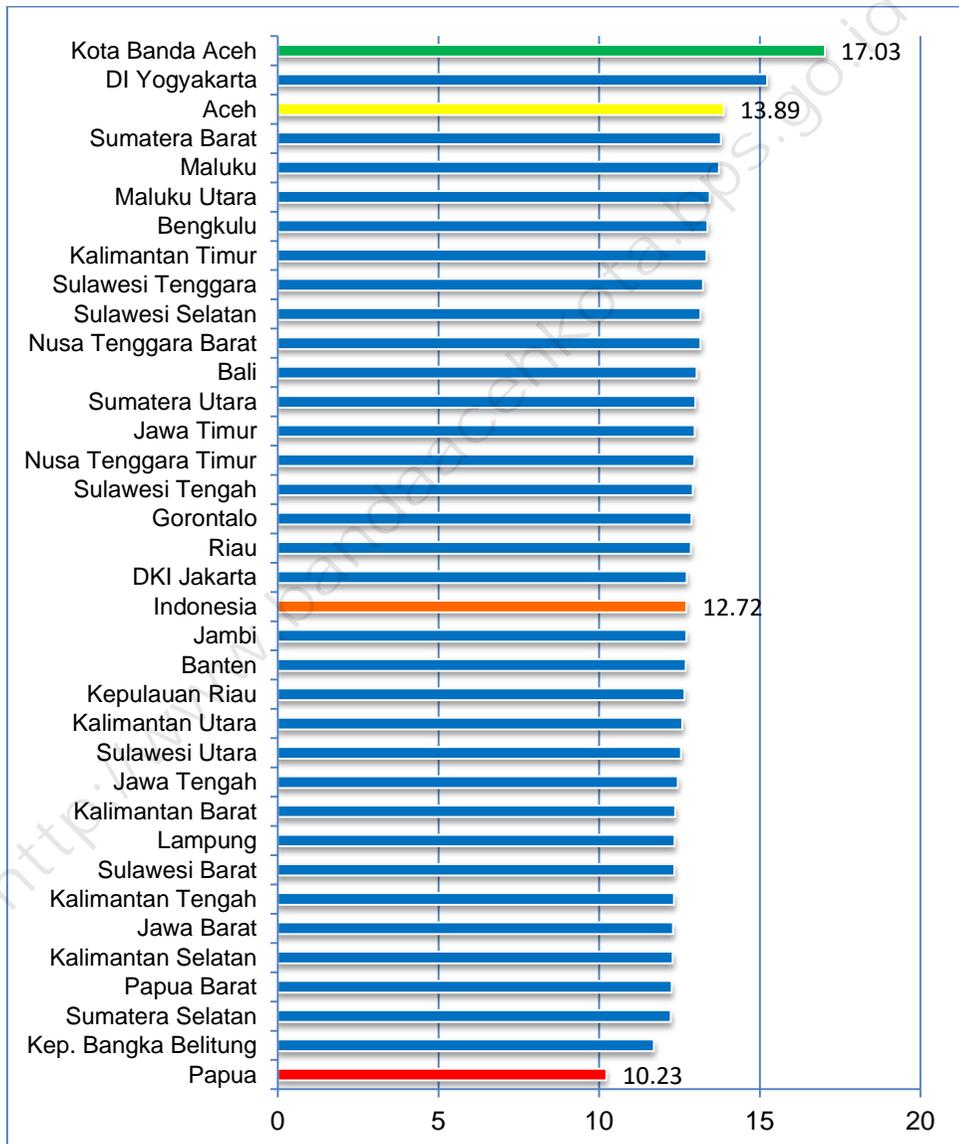
Grafik 3.5.
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016)

Kota Banda Aceh memiliki nilai Angka Harapan Lama Sekolah tertinggi baik dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Aceh maupun dengan seluruh provinsi di Indonesia. HLS terendah di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Timur, sedangkan HLS terendah secara nasional berada di Provinsi Papua.

Grafik 3.6.
HLS Kota Banda Aceh dan Seluruh Provinsi di Indonesia, 2016

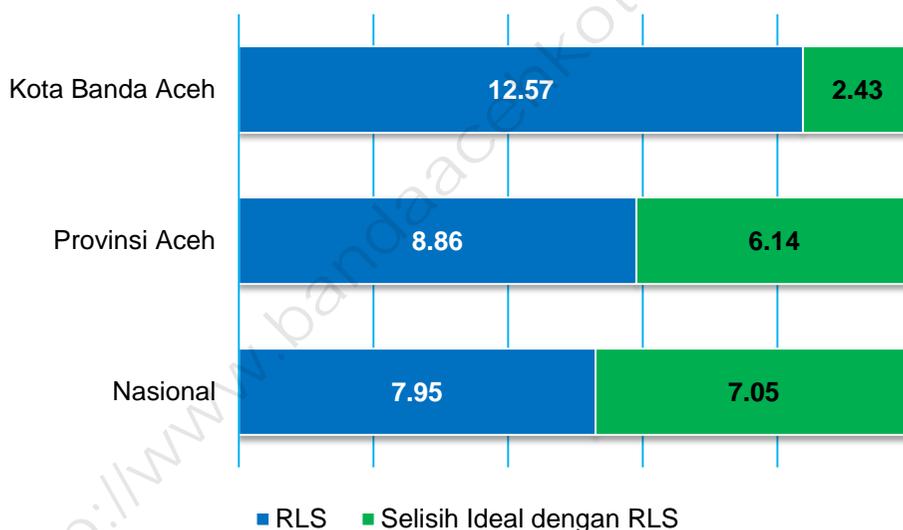


Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016)

3.1.3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan aset paling penting bagi pembangunan. SDM yang berkualitas adalah manusia yang mempunyai kualitas intelektual, watak, moral, akhlak, dan fisik yang prima serta dapat terbentuk apabila setiap warga dapat memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata dan bermutu. Rata-rata lama sekolah bisa digunakan sebagai indikator SDM yang berkualitas. Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah.

Grafik 3.7.
Pencapaian Aktual Rata-rata Lama Sekolah
Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional, 2016

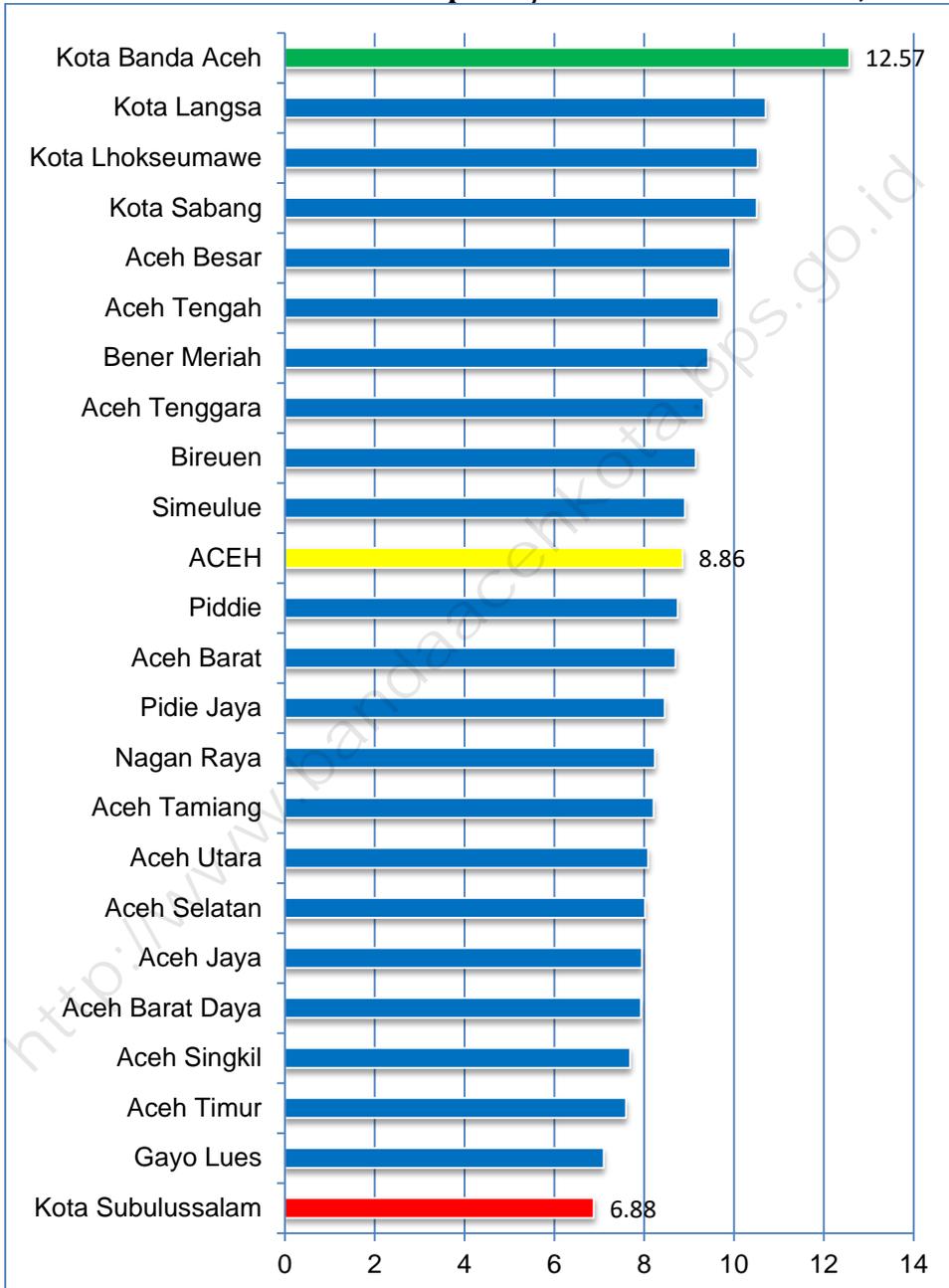


Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016)

Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Banda Aceh tahun 2016 sebesar 12 tahun. Dengan kata lain penduduk di Kota Banda Aceh sudah dapat bersekolah rata-rata tamat di jenjang pendidikan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun di Kota Banda Aceh telah tercapai. Sementara itu, pencapaian angka rata-rata lama sekolah

terendah terjadi di Kabupaten Subulussalam (7 tahun) atau setara dengan kelas 1 SMP.

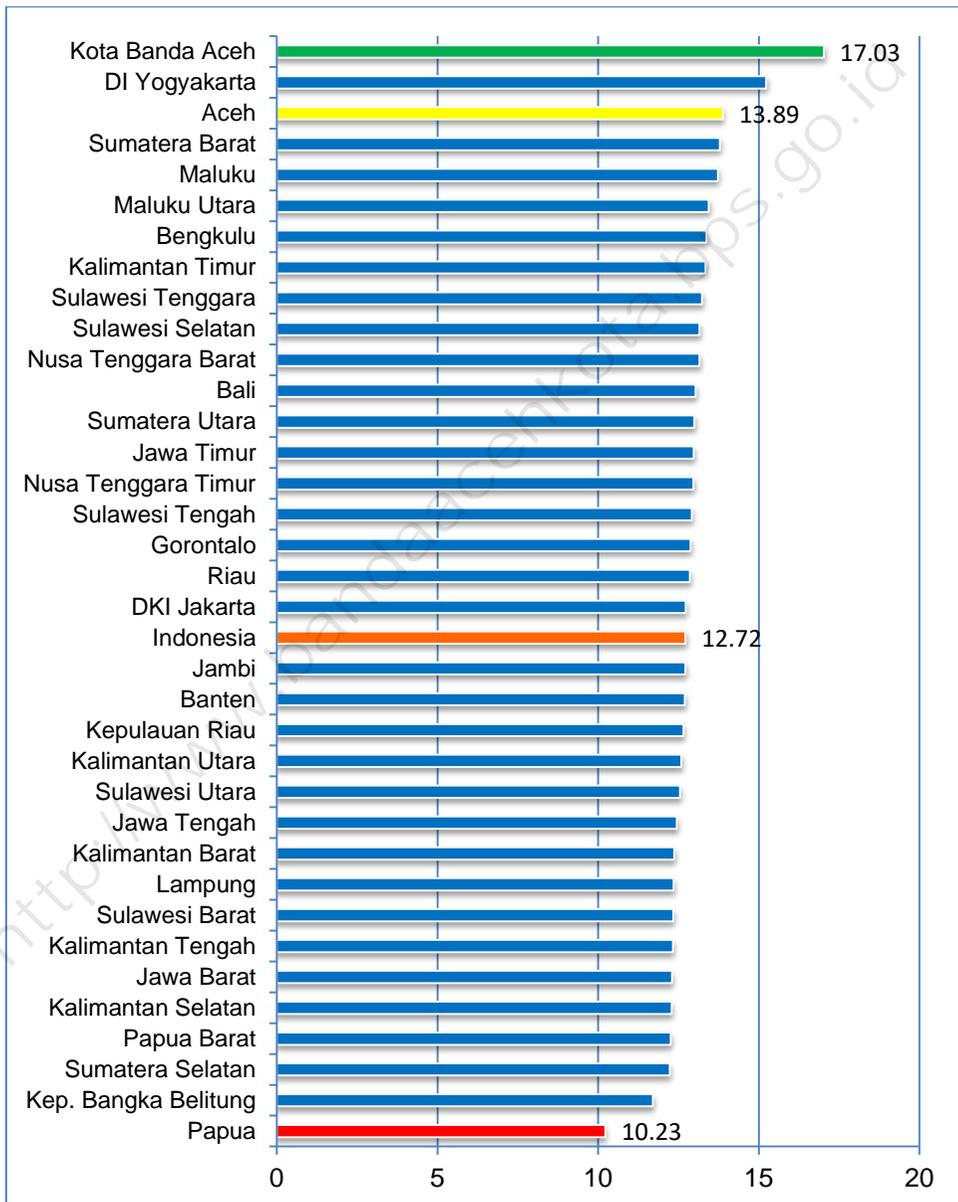
Grafik 3.8.
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016)

Sama seperti Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah di Kota Banda Aceh memiliki nilai tertinggi jika dibandingkan dengan RLS kabupaten/kota di Provinsi Aceh maupun dengan seluruh Provinsi secara nasional. Sementara itu, RLS ternedah masih verada di Provinsi Papua.

Grafik 3.9.
RLS Kota Banda Aceh dan Seluruh Provinsi di Indonesia, 2016

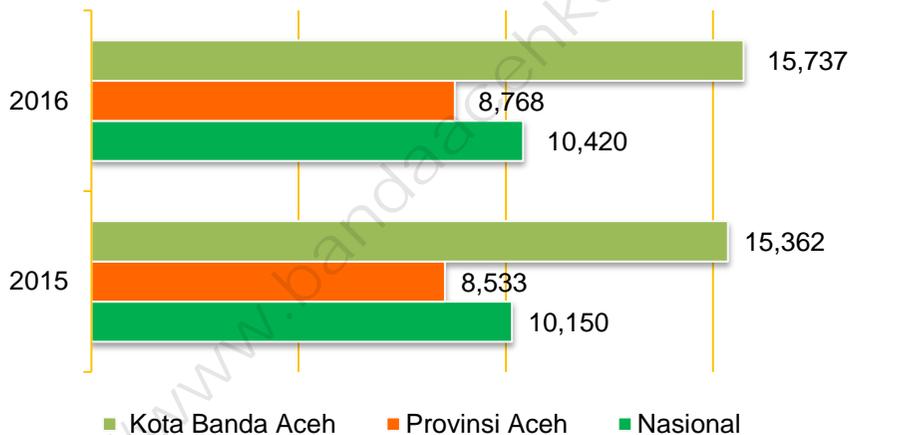


Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016)

3.1.4. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan

Dari hasil penghitungan, diperoleh gambaran rata-rata pengeluaran riil/pengeluaran perkapita disesuaikan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2016, yaitu sekitar Rp 15.737,- ribu per orang per tahun. Angka ini lebih tinggi dibanding keadaan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 15.362,- ribu per orang per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Kota Banda Aceh kedepannya perlu lebih memfokuskan terutama peningkatan pembangunan ekonomi baik dari segi laju pertumbuhan maupun pemerataan hasil pembangunan.

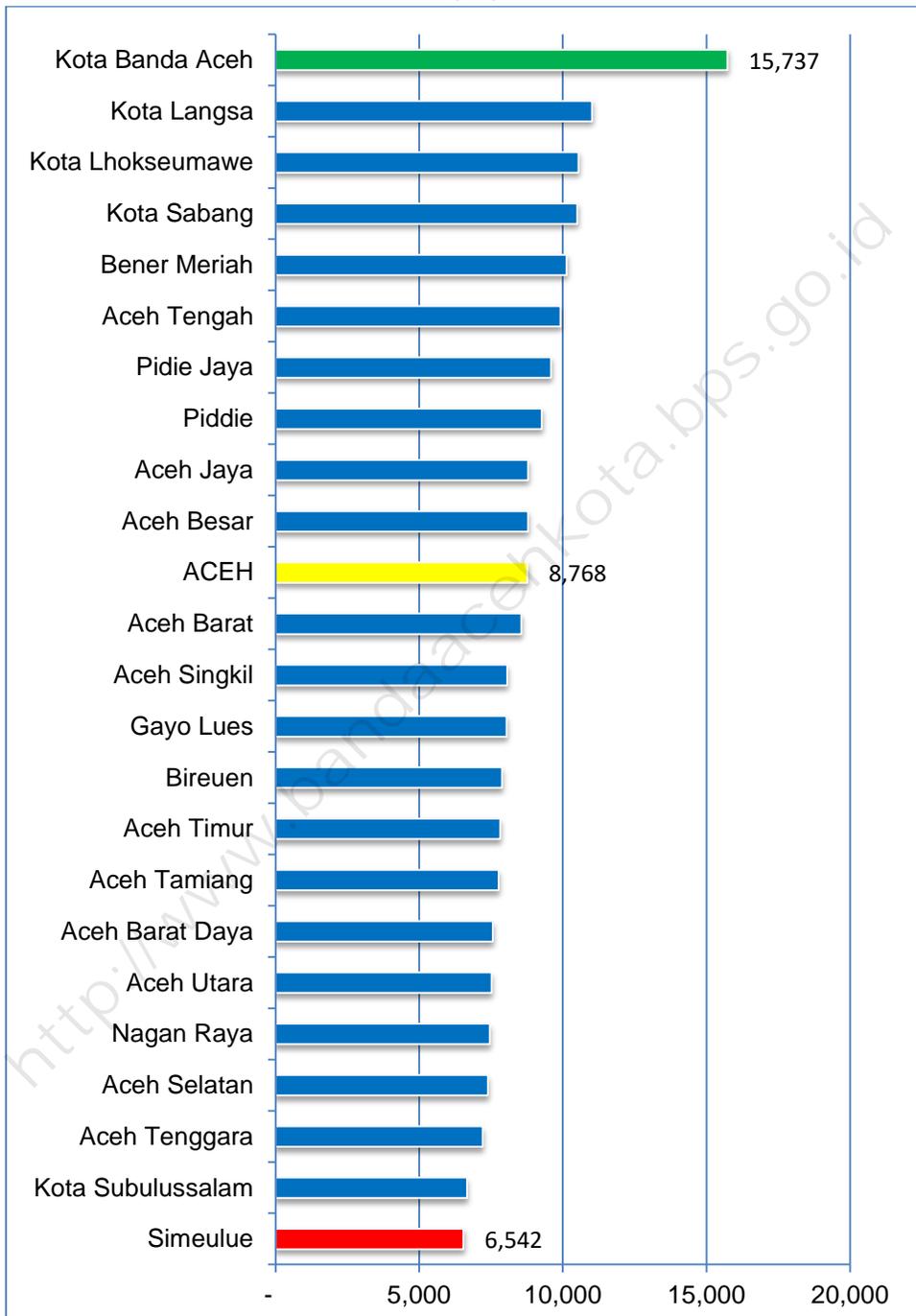
Grafik 3.10.
Pencapaian Aktual Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional (000 Rp per Orang per Tahun), 2016



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016)

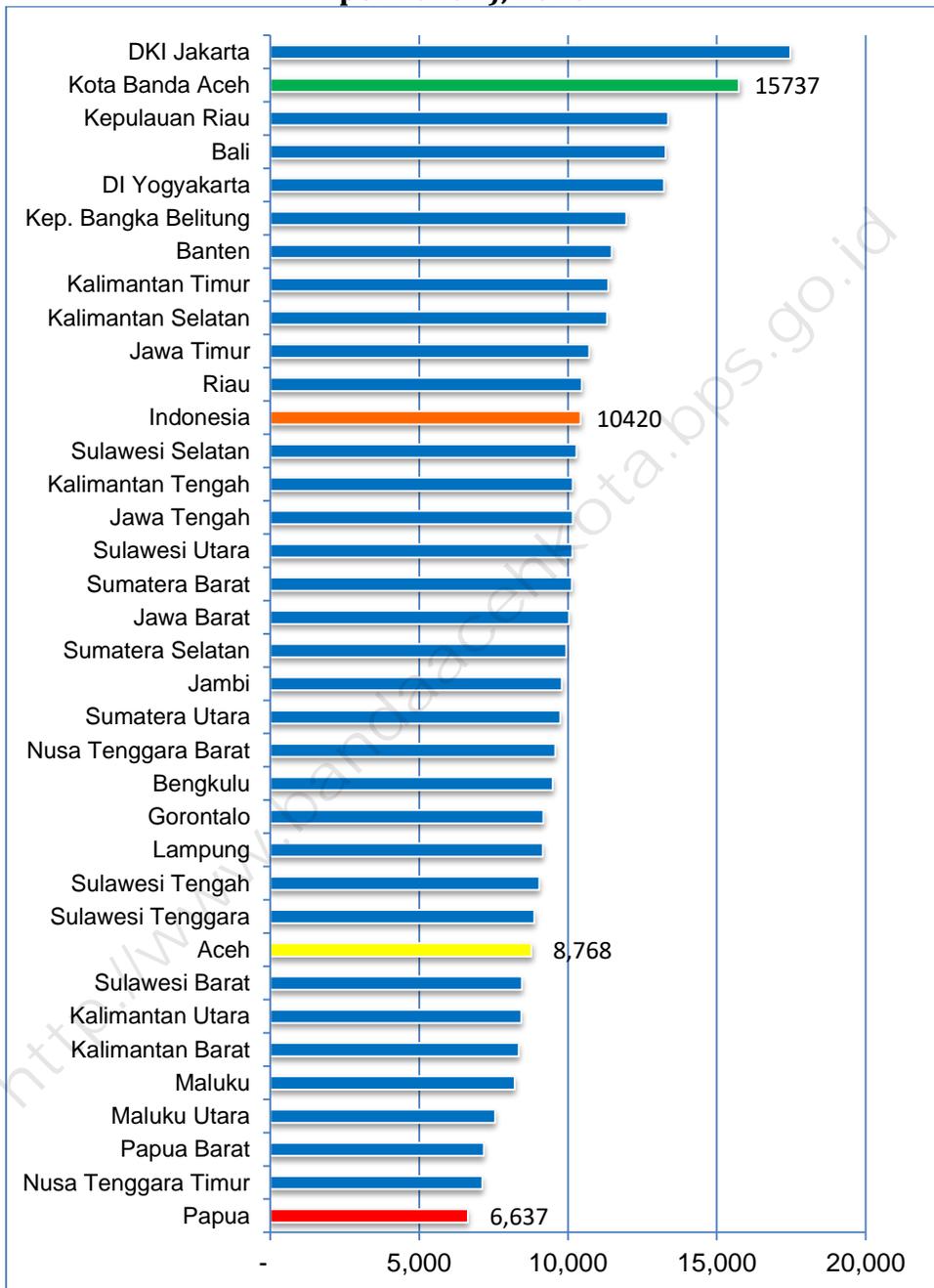
Pencapaian Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Banda Aceh berada di peringkat pertama dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Sementara itu, pencapaian angka rata-rata pengeluaran riil penduduk terendah terjadi di Kabupaten Simeulue. Sementara itu, jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia, Kota Banda Aceh menempati urutan kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, sedangkan nilai terendah masih berada di Provinsi Papua.

Grafik 3.11.
Pencapaian Aktual Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan
Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh (000 Rp per Orang per Tahun),
2016



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016)

Grafik 3.12.
Pencapaian Aktual Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan
Kota Banda Aceh dan Seluruh Provinsi di Indonesia (000 Rp per Orang
per Tahun), 2016



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016)

3.2. IPM Kota Banda Aceh

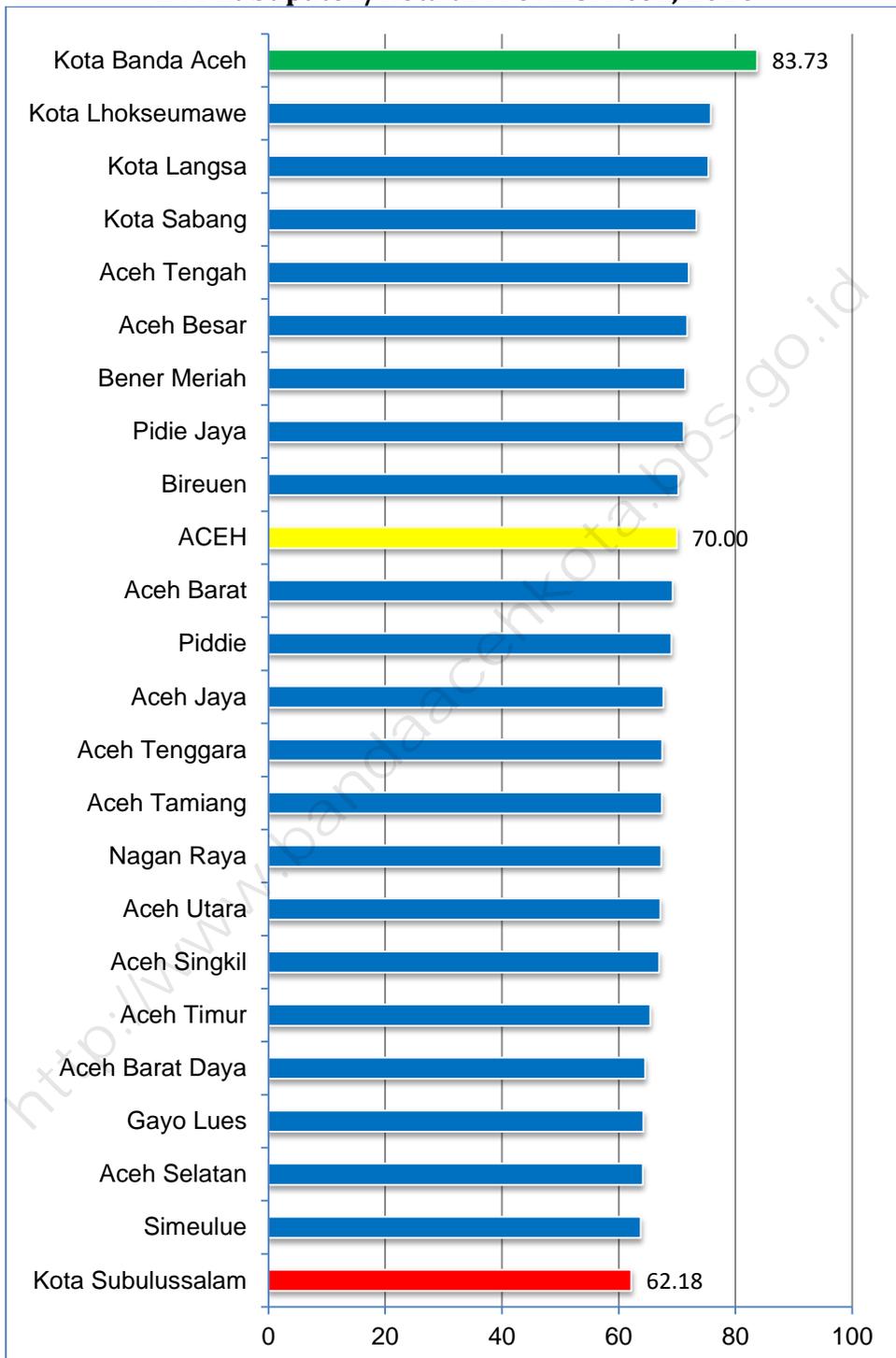
IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM, memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah.

Kinerja pembangunan manusia Kota Banda Aceh tercermin pada angka IPM tahun 2016 yang mencapai angka 83,73. Pencapaian angka IPM tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 83,25. Dengan pencapaian IPM sebesar 83, maka Kota Banda Aceh menurut Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masuk dalam kategori kinerja pembangunan manusia "Tinggi" dengan angka pencapaian IPM diatas 80.

Apabila dirinci menurut kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Aceh, pencapaian IPM berada pada kisaran 62,18 hingga 83,73. IPM Kota Banda Aceh menempati urutan pertama jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Aceh, demikian juga jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, IPM terendah di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Subulussalam dan IPM terendah secara nasional berada Provinsi Papua.

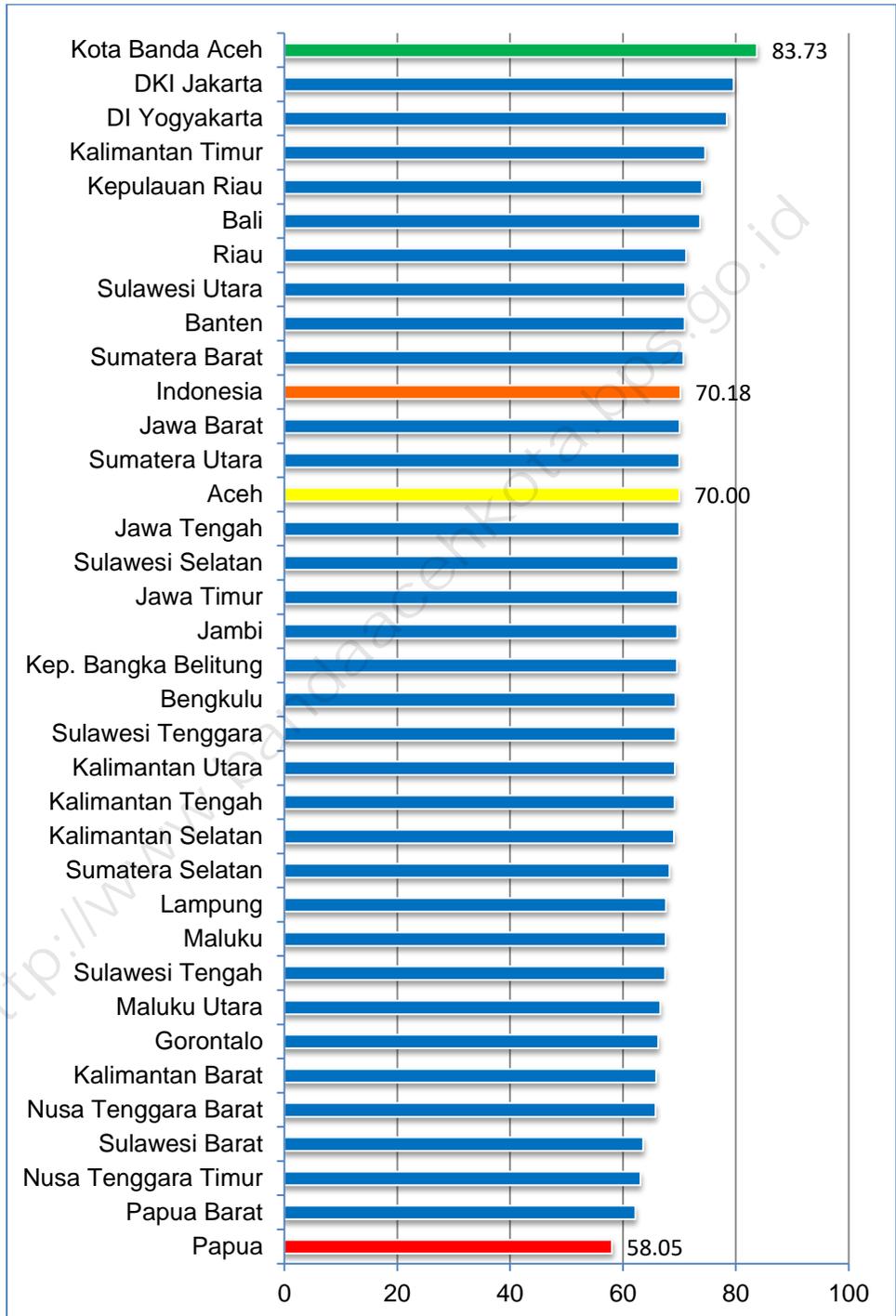
Jika dilihat berdasarkan besaran IPM pada tahun 2016, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh masuk di kategori menengah atas, kecuali Kota Banda Aceh yang sudah termasuk dalam kategori tinggi.

Grafik 3.13.
IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, 2016



Sumber : BPS Kota Banda Aceh (Susenas 2016)

Grafik 3.14.
IPM Kota Banda Aceh dan Seluruh Provinsi di Indonesia, 2016



Lampiran 1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2016													
Kode	Kabupaten/Kota	AHH		EYS		MYS		Pengeluaran		IPM		Rank IPM	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2,016	2015	2016	2015	2,016
0000	Indonesia	70.78	70.90	12.55	12.72	7.84	7.95	10,150	10,420	69.55	70.18		
1100	Aceh	69.50	69.51	13.73	13.89	8.77	8.86	8,533	8,768	69.45	70.00	13	11
1101	Simeulue	64.66	64.78	12.83	13.07	8.90	8.91	6,328	6,542	63.16	63.82	22	22
1102	Aceh Singkil	66.97	67.02	14.26	14.27	7.50	7.69	7,602	8,068	66.05	66.96	17	17
1103	Aceh Selatan	63.61	63.75	13.24	13.53	7.79	8.02	7,224	7,397	63.28	64.13	21	21
1104	Aceh Tenggara	67.40	67.51	13.62	13.96	9.32	9.33	7,001	7,212	66.77	67.48	15	13
1105	Aceh Timur	68.20	68.26	12.23	12.55	7.40	7.60	7,623	7,825	64.55	65.42	18	18
1106	Aceh Tengah	68.44	68.48	14.21	14.23	9.65	9.66	9,473	9,920	71.51	72.04	6	5
1107	Aceh Barat	67.49	67.56	14.55	14.56	8.47	8.70	8,135	8,559	68.41	69.26	11	10
1108	Aceh Besar	69.47	69.49	14.47	14.48	9.91	9.92	8,775	8,788	71.70	71.75	5	6
1109	Pidie	66.46	66.52	13.61	13.93	8.74	8.75	9,233	9,273	68.68	69.06	10	11
1110	Bireuen	70.64	70.72	14.41	14.42	9.14	9.15	7,622	7,885	69.77	70.21	9	9
1111	Aceh Utara	68.48	68.51	14.10	14.11	8.07	8.09	7,327	7,520	66.85	67.19	14	16
1112	Aceh Barat Daya	64.20	64.35	13.20	13.54	7.90	7.93	7,303	7,567	63.77	64.57	19	19
1113	Gayo Lues	64.77	64.88	13.13	13.27	7.06	7.10	7,780	8,048	63.67	64.26	20	20
1114	Aceh Tamiang	68.99	69.08	13.54	13.55	7.95	8.21	7,750	7,766	67.03	67.41	13	14
1115	Nagan Raya	68.59	68.67	14.04	14.09	8.22	8.24	7,141	7,460	66.73	67.32	16	15
1116	Aceh Jaya	66.63	66.70	13.93	13.94	7.89	7.95	8,749	8,796	67.53	67.70	12	12
1117	Bener Meriah	68.79	68.85	13.04	13.42	9.42	9.43	9,760	10,140	70.62	71.42	7	7
1118	Pidie Jaya	69.49	69.59	14.14	14.51	8.45	8.46	9,398	9,590	70.49	71.13	8	8
1171	Kota Banda Aceh	70.89	70.92	17.01	17.03	12.38	12.57	15,362	15,737	83.25	83.73	1	1
1172	Kota Sabang	69.93	70.01	12.98	13.17	10.37	10.51	10,041	10,507	72.51	73.36	4	4
1173	Kota Langsa	68.94	69.00	15.16	15.17	10.49	10.71	10,605	11,015	74.74	75.41	3	3
1174	Kota Lhokseumawe	70.96	71.05	15.14	15.16	10.41	10.53	10,093	10,549	75.11	75.78	2	2
1175	Kota Subulussalam	63.27	63.42	13.73	14.18	6.78	6.88	6,504	6,669	61.32	62.18	23	23

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDA ACEH

Jl. Laksamana Malahayati Km 6,5 Desa Baet, Kabupaten Aceh Besar

Telp/fax. (0651) 8012501, email : bps1171@bps.go.id

<http://bandaacehkota.bps.go.id>